

PENGARUH GENDER TERHADAP KESIAPAN GURU PRAJABATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SASTRA PADA KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH: STUDI DESKRIPTIF KOMPARATIF

The Influence of Gender on Pre-Service Teacher Readiness in the Implementation of Literary Learning in the Secondary School Curriculum: A Comparative Descriptive Study

Ari Ambarwati*, Khoirul Muttaqin

Universitas Islam Malang

Jalan Mt. Haryono 193, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Indonesia

Pos-el: ariati@unisma.ac.id, k.muttaqin89@unisma.ac.id

Abstrak

Kebijakan sastra masuk kurikulum yang diluncurkan Kementerian Pendidikan pada tahun 2024 menimbulkan pertanyaan apakah guru prajabatan siap menerapkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh gender terhadap kesiapan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Bahasa Indonesia Universitas Islam Malang angkatan 2024 dalam mengimplementasikan pembelajaran sastra pada kurikulum sekolah menengah. Penelitian menggunakan rancangan survei deskriptif-komparatif dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Pendekatan ini dipilih untuk memetakan pola respons secara mendalam pada kelompok sasaran tertentu tanpa melakukan generalisasi populasi secara luas. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mencakup tujuh indikator kesiapan dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-komparatif berbasis frekuensi dan proporsi. Temuan penelitian mengindikasikan terdapat perbedaan respons antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap kebijakan “Sastra masuk kurikulum”, terutama dalam aspek pengetahuan kebijakan, sumber informasi, dan kesiapan implementasi. Mahasiswa laki-laki cenderung memiliki keterpaparan informasi yang lebih konsisten dibandingkan mahasiswa perempuan yang memperlihatkan variasi internal lebih lebar. Meskipun demikian, mayoritas responden dari kedua kelompok merasa memerlukan pelatihan dan sumber daya tambahan. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk merancang pelatihan yang lebih tepat sasaran dan menyediakan materi sastra yang komprehensif guna mempersempit kesenjangan pemahaman dan kesiapan guru perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan program sastra masuk kurikulum.

Kata-kata kunci: pengaruh gender; guru prajabatan; literasi kritis dalam pembelajaran sastra; Kebijakan Sastra masuk kurikulum

Abstract

The literary policy in the curriculum launched by the Ministry of Education in 2024 raises the question of whether pre-service teachers are ready to implement the policy. This study aims to explore the influence of gender on the readiness of Indonesian Language Pre-service Teacher Professional Education (PPG) students at the University of Islam Malang, class of 2024, in implementing literary learning in the secondary school curriculum. This study employed a descriptive-comparative survey design with a cross-sectional approach. Data were collected through a questionnaire covering seven readiness indicators and analyzed using descriptive-comparative analysis based on frequency and proportion. This approach was chosen to map the response patterns in depth to a specific target group without generalizing the population broadly. The results indicated differences in responses between male and female students regarding the “Literature in the Curriculum” policy, particularly in terms of policy knowledge, information sources, and implementation readiness. Male students tended to have more consistent information exposure, while female students showed wider internal variation. Nonetheless, most respondents from both groups felt the need for additional training and resources. Further research is recommended to design more targeted training and provide comprehensive literary materials to

narrow the gap in understanding and readiness between female and male teachers in implementing the Literature-in-the-Curriculum program.

Keywords: *gender influence; pre-service teachers; critical literacy in literary learning; Literary Policy in the curriculum*

Informasi Artikel

Naskah Diterima
5 Desember 2025

Naskah Direvisi akhir
26 April 2026

Naskah Diterbitkan
17 Juni 2026

Cara Mengutip

Ambarwati, Ari., dan Khoirul Muttaqin. (2026). Pengaruh Gender terhadap Kesiapan Guru Prajabatan dalam Implementasi Pembelajaran Sastra Pada Kurikulum Sekolah Menengah: Studi Deskriptif Komparatif. *Aksara*. 38(1). 217—231. doi: <http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v38i1.4924.217-231>

PENDAHULUAN

Pendidikan sastra di Indonesia berperan strategis dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan pemahaman keberagaman budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, state of the art riset pendidikan sastra di tingkat global maupun nasional (Indonesia) menegaskan pergeseran paradigma: sastra tidak lagi diposisikan semata sebagai materi apresiasi pasif, melainkan sebagai wahana literasi kritis untuk membaca realitas sosial secara reflektif. Pendekatan ini terbukti berkontribusi nyata pada peningkatan kesadaran kritis murid dalam menghadapi isu-isu kontemporer

Studi menunjukkan pendekatan literasi kritis dalam pembelajaran sastra, misalnya melalui analisis cerita pendek, berkontribusi nyata pada peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran kritis murid (Gandana dkk., 2021; Halimah dkk., 2020; Muttaqin & Murniatie, 2020; Wahyuni dkk., 2022). Studi menunjukkan bahwa integrasi tugas analitis seperti membaca dekat, dialog Socrates, penulisan reflektif, dan penilaian sebaya secara efektif melatih murid mengidentifikasi bias, relasi kuasa, dan implikasi etis dalam teks. Rangkaian aktivitas ini memperkuat argumentasi berbasis bukti serta sensitivitas terhadap ambiguitas makna, representasi sosial, serta agensi (Kier-Byfield, 2024).

Selain sebagai medium berpikir kritis, sastra juga merupakan ekspresi budaya dan peradaban yang merekam nilai, norma, dan peristiwa historis pembentuk identitas kolektif, sekaligus merekonstruksi peristiwa melalui narasi yang menghubungkan masa lalu, nilai-nilai tradisional, dan konteks sosial-politik (Ambarwati & Frida Siswiyanti, 2022; Kapadia et al., 2026; Wahyuni et al., 2022; Wang & Zhang, 2026). Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pluralisme dalam karya sastra dapat menjadi sumber nilai untuk penguatan karakter karena menghadirkan pengalaman batin dan sosial mengenai hidup bersama dalam perbedaan melalui tokoh, konflik, dialog, serta latar budaya. Temuan (Imron & Nugrahani, 2019; Černoša, 2025) menegaskan bahwa karya sastra membuka ruang pembaca untuk memahami identitas sosial yang beragam serta mengembangkan sikap empatik. Artinya, pendidikan sastra memiliki mandat ganda: mengembangkan kecakapan kognitif tingkat tinggi sekaligus menguatkan dimensi afektif dan etis.

Namun, keberhasilan mandat tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi pembelajaran sastra di kelas, dan ini tidak bisa dilepaskan dari kesiapan guru. Pada level sekolah menengah, implementasi pembelajaran sastra menuntut guru mampu merancang pengalaman belajar yang memadukan pemahaman teks, diskusi kritis, respons kreatif, serta asesmen yang selaras dengan tujuan literasi dan karakter. Pada titik ini, guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator interpretasi, mediator dialog, dan pengelola dinamika kelas yang sering kali memunculkan perbedaan nilai, identitas, dan pengalaman sosial murid. Karena itu, menelaah kesiapan guru, khususnya guru prajabatan,

menjadi penting, sebab fase prajabatan merupakan periode pembentukan keyakinan pedagogik, identitas profesional, dan repertoar strategi mengajar yang akan terbawa ke praktik lapangan.

Sebagai konstruksi sosial, gender memengaruhi cara guru membangun otoritas pedagogik, menegosiasikan empati, serta memfasilitasi dialog di ruang kelas. Di sisi lain, literatur pendidikan dan studi identitas guru menunjukkan bahwa praktik mengajar berkelindan dengan faktor sosial-budaya, terutama gender. Gender tidak sekadar kategori demografis, tetapi sebuah konstruksi sosial yang dapat memengaruhi cara individu berkomunikasi, membangun otoritas, menegosiasikan empati, dan memfasilitasi dialog (Dishari & Alafnan, 2023; Mapulanga & Bwalya, 2025). Perbedaan preferensi belajar yang tampak terkait gender menunjukkan bahwa dimensi ini memengaruhi cara murid menilai dan merespons praktik mengajar. Misalnya, murid laki-laki cenderung lebih menghargai aktivitas yang bersifat praktis dan narasi lisan, sementara murid perempuan lebih menyukai representasi visual seperti grafik dan diagram. Pola ini penting bukan untuk 'mengunci' murid pada kategori gender tertentu, melainkan untuk menegaskan bahwa ruang kelas berisi spektrum preferensi belajar yang beragam.

Integrasi pemikiran dari Alnahdi & Schwab (2023) serta Mukagiahana dkk (2024) memperkuat argumen bahwa efektivitas pengajaran sastra sangat bergantung pada sejauh mana guru mampu menavigasi dinamika sosial ini. Pengakuan atas spektrum preferensi belajar murid adalah langkah awal untuk menciptakan ekosistem kelas yang lebih inklusif dan humanis, sesuai dengan tujuan kebijakan "Sastra Masuk Kurikulum".

Kesiapan guru prajabatan dalam konteks ini tidak hanya ditentukan oleh kapasitas kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh spektrum persepsi kesetaraan yang sering kali masih berada pada level rata-rata karena belum kuatnya integrasi perspektif gender dalam kurikulum pendidikan guru (Yeasmin, 2023). Tantangan utama muncul ketika kesadaran teoretis tersebut tidak selaras dengan praktik nyata, di mana penggunaan bahasa guru di kelas sering kali masih menjadi saluran bagi masuknya stereotip tradisional melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) (Berhanu et al., 2026).

Tanpa adanya mediasi kritis terhadap materi ajar, guru berisiko terjebak dalam pendekatan yang mengabaikan bias gender dalam buku teks, yang pada gilirannya dapat melanggengkan ketidaksetaraan di ruang kelas (Vu & Pham, 2025). Oleh karena itu, memahami bagaimana konstruksi gender ini berelasi dengan kesiapan pedagogik guru prajabatan menjadi krusial, mengingat fase prajabatan adalah periode pembentukan keyakinan profesional yang akan dibawa ke praktik lapangan.

Kajian yang dilakukan (Rogošić & Baranović, 2024) menemukan bahwa isu/pengetahuan berbasis gender belum dianggap penting dalam kurikulum pendidikan guru di Kroasia. Topik gender memang dimasukkan, tetapi dengan struktur dan pengaturan kurikulum yang lemah, sehingga implementasinya mudah tidak konsisten, pemahaman mahasiswa bisa kabur, dan mata kuliah terkait gender cenderung dipilih karena minat pribadi bukan kebutuhan profesional. Rekomendasinya adalah memperkuat sensitivitas gender dalam kurikulum agar calon guru lebih siap mengajarkan kesetaraan gender. Karena itu, praktik pembelajaran yang inklusif gender menjadi relevan sebagai strategi pedagogik: guru perlu merancang variasi aktivitas, cara penyajian materi, dan bentuk partisipasi agar tidak ada kelompok murid yang secara sistematis merasa kurang terlayani atau kurang dianggap cocok dengan cara belajar yang dominan.

Dalam pembelajaran sastra yang sarat interpretasi dan diskusi nilai, dimensi ini berpotensi memengaruhi pilihan teks, cara guru menanggapi respons murid, strategi memoderasi perdebatan, serta keberanian membawa isu sensitif (misalnya ketidakadilan, stereotip, atau relasi kuasa) ke ruang kelas. Meski demikian, riset implementasi pembelajaran sastra di Indonesia lebih sering menekankan aspek pendekatan, model, media, atau hasil belajar, sementara keterkaitan antara gender dan kesiapan pedagogik guru prajabatan dalam konteks

implementasi sastra di kurikulum sekolah menengah masih belum banyak dipetakan secara sistematis. Di sinilah research gap penelitian ini berada: minimnya pemahaman mendalam mengenai bagaimana gender berelasi dengan kesiapan, keyakinan, dan strategi guru prajabatan ketika menerjemahkan sastra ke dalam praktik kurikuler di sekolah menengah.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh gender pada kesiapan guru prajabatan dalam mengimplementasikan pembelajaran sastra di kurikulum sekolah menengah melalui pendekatan deskriptif-komparatif. Secara spesifik, penelitian ini menjawab pertanyaan: (1) Apakah terdapat perbedaan pengetahuan tentang kebijakan Sastra Masuk Kurikulum antara mahasiswa PPG laki-laki dan perempuan? (2) Bagaimana pola sumber informasi yang digunakan berbeda berdasarkan gender? (3) Bagaimana tingkat kesiapan implementasi berbeda antara kedua kelompok gender? Kebaruan kajian ini terletak pada fokusnya yang menghubungkan tiga ranah yang sering dipisah: studi implementasi pembelajaran sastra, pendidikan guru prajabatan, dan analisis sosial gender dalam praktik pedagogik. Alih-alih hanya mengukur efektivitas model pembelajaran, penelitian ini menempatkan guru prajabatan sebagai subjek yang memiliki keyakinan, orientasi pedagogik, dan strategi yang dibentuk oleh pengalaman serta konstruksi sosial, termasuk gender. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan pemahaman analitik mengenai mekanisme yang membuat kesiapan implementasi pembelajaran sastra berbeda atau serupa lintas gender, sekaligus menawarkan dasar konseptual bagi penguatan program pendidikan guru yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial dalam pembelajaran sastra.

Secara praktis, temuan penelitian diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan guru, khususnya pada mata kuliah/komponen yang terkait pedagogi sastra, literasi kritis, dan pengelolaan diskusi kelas. Bagi sekolah dan pemangku kebijakan, kajian ini berpotensi menjadi referensi untuk menyusun dukungan penerapan sastra lebih efektif dan inklusif, sehingga tujuan pendidikan sastra, berpikir kritis, literasi kritis, dan penguatan karakter dalam masyarakat plural, lebih mungkin tercapai secara konsisten di tingkat sekolah menengah.

Kajian pustaka yang digunakan meliputi beberapa konsep yang dipaparkan dalam uraian berikut. (1) gender dan kesiapan guru prajabatan, (2) literasi kritis dalam pembelajaran sastra, dan (3) kebijakan sastra masuk kurikulum dan implikasinya bagi guru. Kesiapan guru prajabatan (*pre-service teacher readiness*) merujuk pada kesiapan kognitif, afektif, dan praktis calon guru untuk mengimplementasikan pembelajaran di kelas (Darling-Hammond, 2017). Dalam konteks pedagogik sastra, kesiapan ini mencakup penguasaan isi sastra, strategi pengajaran apresiasi dan literasi kritis, serta kemampuan mengelola diskusi yang sarat nilai. Gender, sebagai konstruksi sosial, terbukti mempengaruhi orientasi pedagogik, gaya komunikasi, dan kepercayaan diri guru (Dishari & Alafnan, 2023; Mapulanga & Bwalya, 2025). Studi Rogosić & Baranović (2024) mengungkap bahwa sensitivitas gender dalam kurikulum pendidikan guru masih lemah, sehingga calon guru belum cukup dibekali untuk mengajar secara inklusif-gender. Pola serupa ditemukan di Indonesia, di mana pembelajaran sastra di sekolah masih lebih menekankan pengetahuan daripada apresiasi dan literasi kritis (Gandana dkk., 2021; Halimah dkk., 2020).

Literasi kritis dalam pembelajaran sastra mengacu pada pendekatan yang mengajak peserta didik mempertanyakan kekuasaan, representasi, dan ideologi dalam teks (Kier-Byfield, 2024). Pendekatan ini relevan dalam konteks kebijakan Sastra Masuk Kurikulum karena menuntut guru mampu membimbing siswa tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga merefleksikan dimensi sosial, budaya, dan etisnya. Ambarwati Wahyuni dkk. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan literasi kritis dalam pembelajaran sastra secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial siswa. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan dan keyakinan pedagogik guru prajabatan,

yang menurut sejumlah studi dipengaruhi oleh faktor gender (Alnahdi & Schwab, 2023; Mukagiahana dkk., 2024).

Kebijakan Sastra Masuk Kurikulum yang diluncurkan Kementerian Pendidikan pada tahun 2024 menempatkan sastra sebagai komponen mandiri dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah. Kebijakan ini mensyaratkan guru memiliki kompetensi mengintegrasikan apresiasi sastra, literasi kritis, dan respons kreatif dalam satu rancangan pembelajaran yang kohesif. Sejumlah kajian mengingatkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum baru sering terhambat oleh keterbatasan pelatihan, kurangnya bahan ajar, dan rendahnya pemahaman guru terhadap tujuan kebijakan (Rahmah et al., 2024; Suhandi & Robi'ah, 2022). Kesenjangan akses informasi berbasis gender juga berpotensi memperburuk kondisi ini, terutama bagi guru perempuan yang menghadapi hambatan struktural dalam mengakses informasi dan pelatihan terkait kebijakan baru.

Implementasi kurikulum baru sering kali terkendala oleh keterbatasan pelatihan, kurangnya sumber daya materi, dan rendahnya literasi kebijakan di kalangan guru. Masalah tersebut diperparah oleh hambatan struktural yang memicu kesenjangan akses informasi berbasis gender, sehingga guru perempuan berisiko memiliki kesiapan yang lebih rendah dalam mengadopsi kebijakan pendidikan terbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif-komparatif dan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Desain ini dipilih untuk memetakan kondisi pengetahuan, sumber informasi, pemahaman tujuan kebijakan, pengalaman pelatihan, serta kesiapan implementasi kebijakan Sastra Masuk Kurikulum pada satu waktu, sekaligus membandingkan kecenderungan respons berdasarkan gender. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan kausal, melainkan menggambarkan pola dan perbedaan respons antar kelompok.

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bahasa Indonesia Universitas Islam Malang angkatan 2024 yang berjumlah 32 orang, terdiri atas 27 perempuan dan 5 laki-laki. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian. Pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa PPG merupakan calon guru yang berada pada tahap transisi menuju praktik pembelajaran, sehingga relevan untuk menilai kesiapan implementasi kebijakan pendidikan.

Data penelitian berupa data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk angket dengan skala ordinal empat tingkat untuk mengukur pemahaman dan kesiapan responden. Skala pemahaman terdiri atas kategori baik, cukup, sedikit, dan tidak sama sekali, sedangkan skala kesiapan terdiri atas kategori siap, cukup siap, kurang siap, dan tidak siap. Instrumen telah melalui uji validitas isi melalui *expert judgment* oleh dua ahli di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, reliabilitas instrumen dijaga melalui uji keterpahaman butir (*clarity check*) untuk memastikan kejelasan dan konsistensi interpretasi responden terhadap setiap item.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahap penyebaran kuesioner kepada seluruh responden, pengisian kuesioner secara mandiri, rekapitulasi data, pengelompokan data berdasarkan gender, serta pengolahan data sesuai indikator penelitian, meliputi pengetahuan kebijakan, sumber informasi, pemahaman tujuan kebijakan, pengalaman pelatihan, kesiapan implementasi, kesiapan kurikulum, dan saran responden.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif dengan menghitung frekuensi dan persentase pada setiap kategori respons, kemudian membandingkan hasilnya antara kelompok laki-laki dan perempuan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk

deskripsi naratif yang didukung oleh data kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan uji hipotesis inferensial karena keterbatasan jumlah responden laki-laki yang tidak memenuhi asumsi statistik untuk pengujian, sehingga temuan penelitian lebih diarahkan sebagai pemetaan awal (*baseline*) terhadap kesiapan calon guru dalam implementasi kebijakan.

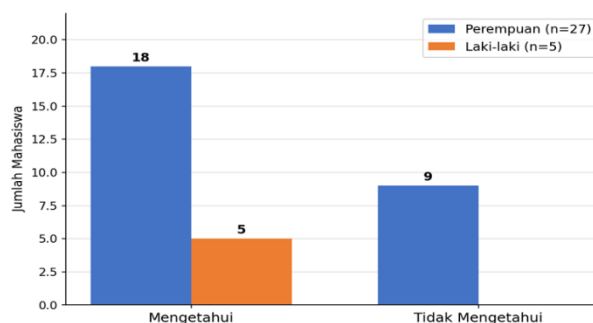
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perbedaan kesiapan guru laki-laki dan perempuan dalam mengajar sastra di sekolah menengah, khususnya dalam konteks kebijakan Sastra masuk kurikulum. Data awal yang dikumpulkan dari 32 mahasiswa PPG Universitas Islam Malang, Bahasa Indonesia angkatan 2024, menunjukkan variasi pemahaman, kesiapan, dan sumber pengetahuan tentang kebijakan ini. Misalnya, semua murid laki-laki mengetahui tentang kebijakan ini, sementara hanya 18 dari 27 murid perempuan yang mengetahuinya. Selain itu, ada perbedaan kesiapan untuk menerapkan kebijakan ini, dengan 12 murid perempuan dan 2 murid laki-laki menyatakan kesiapan, dan 8 murid perempuan dan 1 murid laki-laki menyatakan bahwa mereka cukup siap.

Dalam pembahasan kali ini ada beberapa topik yang menjadi perhatian. Semua topik tersebut terkait dengan kebijakan “Sastra masuk kurikulum” yang masih diperbincangkan di media sosial atau pertemuan ilmiah. Dalam penelitian ini, difokuskan pada bagaimana murid perempuan dan laki-laki merespons kebijakan “Sastra masuk kurikulum” yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

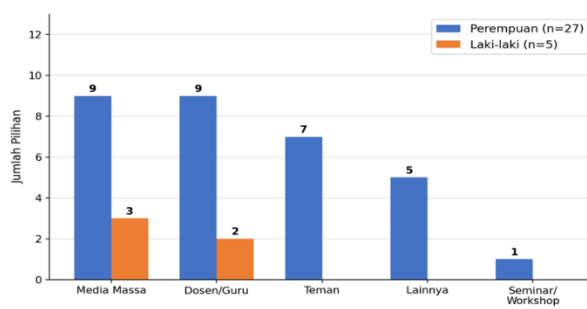
Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 32 mahasiswa PPG di bidang Bahasa Indonesia angkatan 2024, dapat dihasilkan penjelasan sebagai berikut. Pertama, hubungan antara mengetahui atau tidak mahasiswa dengan kebijakan Sastra masuk kurikulum. Dari 32 murid tersebut, yakni 27 murid putri, dan 5 murid laki-laki mengisi kuesioner. Ada 18 mahasiswi yang mengetahui tentang kebijakan tersebut, dan 8 mahasiswi tidak tahu. Sementara itu, dari mahasiswa laki-laki, semua mahasiswa laki-laki mengetahui kebijakan tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, terdapat kecenderungan perbedaan pola respons antara mahasiswa perempuan dan laki-laki pada seluruh indikator kesiapan. Secara umum, mahasiswa laki-laki menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi, sementara mahasiswa perempuan memperlihatkan variasi respons yang lebih lebar. Rincian temuan per indikator diuraikan pada subbagian berikut disertai diagram distribusi data (Gambar 1–6).



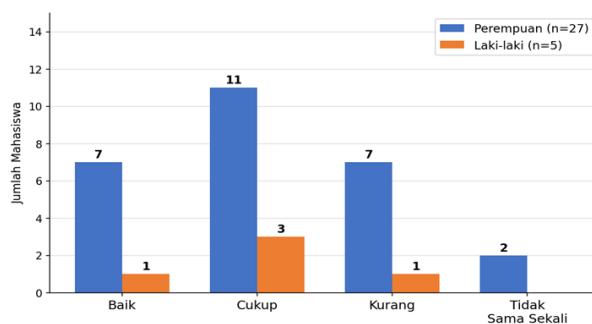
Gambar 1. Pengetahuan mahasiswa tentang kebijakan sastra masuk kurikulum

Pada gambar 2 media massa dan dosen/guru merupakan saluran utama informasi bagi kedua kelompok. Mahasiswi menunjukkan keragaman sumber yang lebih lebar, termasuk teman, lainnya, dan seminar/workshop, sementara mahasiswa laki-laki relatif terkonsentrasi pada media massa dan dosen. Setiap responden dapat memilih lebih dari satu sumber, sehingga jumlah pilihan melebihi jumlah responden.



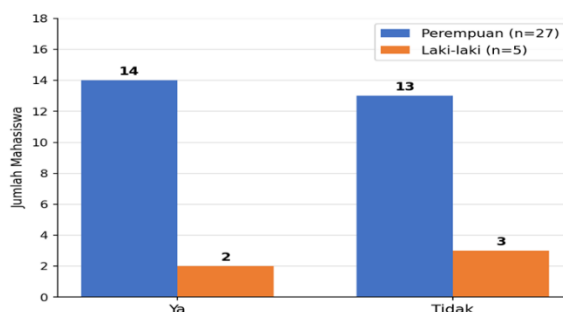
Gambar 2. Sumber Informasi tentang kebijakn sastra masuk kurikulum

Distribusi pemahaman tujuan kebijakan disajikan pada Gambar 3. Kategori “cukup” mendominasi respons kedua kelompok (41% perempuan; 60% laki-laki). Perempuan tersebar lebih luas hingga kategori “tidak sama sekali” (7%), sedangkan tidak ada mahasiswa laki-laki yang masuk kategori tersebut, menunjukkan variasi internal yang lebih sempit pada kelompok laki-laki.



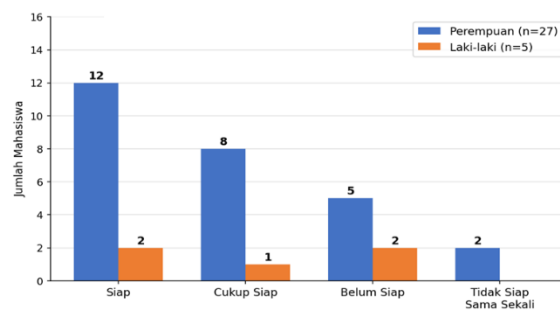
Gambar 3. Pemahaman mahasiswa tentang kebijakan sastra masuk kurikulum

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, akses terhadap pelatihan kebijakan terbagi hampir merata: 50% responden menyatakan pernah menerima pelatihan dan 50% belum. Perempuan sedikit lebih banyak yang menerima pelatihan (52%), sedangkan laki-laki lebih banyak yang belum (60%), meskipun selisihnya kecil.



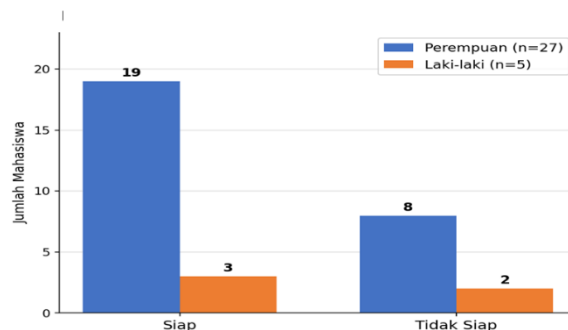
Gambar 4. Penerimaan informasi dan pelatihan tentang kebijakan dari program PPG

Distribusi kesiapan implementasi ditampilkan pada Gambar 5. Sebagian besar responden menyatakan siap (44%) atau cukup siap (28%). Perempuan tersebar di semua kategori termasuk “tidak siap sama sekali” (7%), sedangkan tidak ada laki-laki di kategori tersebut. Data lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.



Gambar 5. Kesiapan mahasiswa menerapkan kebijakan sastra masuk kurikulum setelah lulus

Gambar 6 menunjukkan persepsi mahasiswa terhadap kesiapan kurikulum PPG. Mayoritas (69%) menilai kurikulum sudah siap mendukung kebijakan sastra masuk kurikulum, dengan proporsi serupa antara perempuan (70%) dan laki-laki (60%).



Gambar 6. Persepsi mahasiswa terhadap kesiapan kurikulum PPG dalam pembelajaran sastra

Terakhir, ada pertanyaan terkait saran dari mahasiswa tentang kebijakan “Sastra masuk kurikulum”. Sebagian besar mahasiswa menyarankan penambahan materi sastra masuk kurikulum PPG. Hal ini dikarenakan mahasiswa merasa masih kekurangan materi pembelajaran sastra dalam kurikulum PPG. Rekapitulasi seluruh data kuesioner disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi data kuesioner kesiapan mahasiswa PPG berdasarkan gender pengetahuan murid tentang kebijakan dan sumber daya informasi

Indikator / Kategori	Perempuan (n=27)	Laki-laki (N=5)	Total (N=32)
1. Pengetahuan kebijakan			
Mengetahui	18 (67%)	5 (100%)	23 (72%)
Tidak mengetahui	9 (33%)	0 (0%)	9 (28%)
2. Pemahaman tujuan kebijakan			
Baik	7 (26%)	1 (20%)	8 (25%)
Cukup	11 (41%)	3 (60%)	14 (44%)
Kurang	7 (26%)	1 (20%)	8 (25%)
Tidak sama sekali	2 (7%)	0 (0%)	2 (6%)
3. Menerima pelatihan dari PPG			
Ya	14 (52%)	2 (40%)	16 (50%)
Tidak	13 (48%)	3 (60%)	16 (50%)
4. Kesiapan implementasi			
Siap	12 (44%)	2 (40%)	14 (44%)
Cukup siap	8 (30%)	1 (20%)	9 (28%)
Belum siap	5 (19%)	2 (40%)	7 (22%)
Tidak siap sama sekali	2 (7%)	0 (0%)	2 (6%)
5. Kesiapan kurikulum PPG			
Siap	19 (70%)	3 (60%)	22 (69%)
Tidak siap	8 (30%)	2 (40%)	10 (31%)

Sumber: data primer penelitian, 2024

Sebagian besar mahasiswa PPG sebanyak (72%), mengaku sudah mengetahui kebijakan “Sastra masuk kurikulum”. Menariknya, semua mahasiswa laki-laki (5/5) termasuk dalam

kelompok ini, sedangkan mahasiswa perempuan sebenarnya terbagi: 18 tahu, 9 tidak. Kondisi ini mengisyaratkan dua hal: pertama, jalur informasi yang menjangkau pria tampaknya lebih konsisten; Kedua, ada kantong-kantong mahasiswi yang belum tersentuh sosialisasi kebijakan, memperkuat temuan sebelumnya tentang kesenjangan akses informasi dalam ekosistem pendidikan. Temuan tersebut menegaskan bahwa guru sering menahan diri untuk tidak terlibat dalam diskusi kelas tentang gender dan identitas gender karena pengetahuan pedagogis yang terbatas, takut akan sanksi institusional, dan pemahaman yang tidak memadai tentang kebijakan yang relevan, yang bersama-sama mendorong penyensor diri dan mempersempit ruang lingkup dialog terkait gender, sementara dalam konteks tertentu seperti Australia, kurikulum dan teks kebijakan hanya memberikan representasi minimal dari beragam gender dan seksualitas dan tetap terbentuk oleh ideologi *hetero-cis-normatif*, sehingga membatasi kapasitas guru untuk memperkenalkan narasi gender yang lebih inklusif dan beragam (Lammert & C. Godfrey, 2023; van Leent & Spina, 2023). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dari 32 murid, sebagian besar murid laki-laki mengetahui kebijakan ini, sementara hanya beberapa murid perempuan yang memiliki pemahaman yang sama.

Ketimpangan gender dalam akses informasi dianggap lazim. Perempuan sering menghadapi hambatan sistemik yang menghambat kemampuan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan informasi secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman kebijakan yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan laki-laki mereka. Akses informasi yang tidak merata memperlebar kesenjangan dalam kualitas implementasi kurikulum, menekankan bahwa perjuangan untuk memasukkan literatur dalam kurikulum tidak hanya tentang konten, tetapi juga tentang memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memahami, menafsirkan, dan mengawasi kebijakan pendidikan. Perlu dicatat bahwa rujukan ini berasal dari konteks internasional sehingga penerapannya pada konteks kebijakan pendidikan Indonesia perlu dimaknai secara hati-hati sebagai kerangka konseptual, bukan generalisasi langsung (Neuman, 2016).

Ketika mencari sumber pengetahuan, media massa dan dosen merupakan saluran utama (masing-masing dipilih 12 dan 11 kali). Perempuan cenderung menggunakan jejaring sosial secara lebih beragam, seperti yang terlihat dari pilihan "teman", "lain", dan "seminar/workshop" yang seluruhnya diisi oleh mahasiswi, sedangkan laki-laki relatif fokus pada media dan dosen. Pola ini menunjukkan bahwa strategi diseminasi harus menggabungkan dua pendekatan: penguatan kanal formal (dosen, pelatihan) sekaligus memanfaatkan jejaring informal mahasiswi sehingga informasi sampai ke kelompok yang sebelumnya terlewatkan.

Perempuan cenderung lebih banyak menggunakan jejaring sosial untuk menjaga hubungan yang ada, mengikuti isu atau agenda tertentu, termasuk mentor dan komunitas, terutama dalam konteks akademik dan profesional (Lewis et al., 2018; Navarro & Antunes, 2023; Sadrul Huda & Shupti, 2025). Sejalan dengan itu, media sosial memungkinkan perempuan untuk membangun identitas profesional, menantang norma-norma masyarakat, dan terlibat dalam usaha kewirausahaan. Kemampuan beradaptasi ini membantu mereka menyeimbangkan peran pribadi dan profesional sambil menavigasi hambatan struktural (Dwityas et al., 2025). Pemanfaatan strategis jejaring sosial oleh perempuan menunjukkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai instrumen vital untuk memperkuat modal sosial dan intelektual melalui penciptaan iklim komunikasi yang lebih empatik serta inklusif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap pola adaptasi dan kekuatan jejaring informal ini menjadi krusial dalam merancang strategi diseminasi informasi profesional yang mampu melampaui hambatan struktural guna memastikan kesetaraan akses terhadap kebijakan pendidikan.

Mahasiswa memperoleh informasi mengenai kebijakan "Sastra masuk kurikulum" melalui berbagai sumber, seperti media massa, dosen, teman, seminar, dan workshop. Mayoritas mahasiswa laki-laki mengandalkan media massa, sedangkan mahasiswa perempuan

menunjukkan variasi dalam memilih sumber informasi. Keragaman sumber informasi sangat penting bagi murid untuk memahami topik yang kompleks seperti kebijakan pendidikan. Akses ke sumber yang bervariasi dan kredibel memungkinkan murid memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang masalah kebijakan dan implikasinya. Meskipun ketimpangan informasi ini dimungkinkan karena bias gender dalam memilih sumber informasi (Malin & Lubienski, 2022).

Memahami Tujuan Kebijakan

Ketika ditanya tentang pemahaman tujuan kebijakan, hasilnya menunjukkan perbedaan tingkat pemahaman yang terlihat nyata antara mahasiswa perempuan dan laki-laki. Dari 32 responden, pola pemahaman tujuan kebijakan “Sastra masuk kurikulum” menunjukkan distribusi yang relatif moderat namun tidak merata antar gender. Secara agregat, kategori “baik” hanya dicapai oleh 8 murid (25%), didominasi oleh perempuan (7 dari 27; 26%) dan laki-laki 1 dari 5 (20%). Kategori “memadai” adalah jawaban yang paling umum, 14 murid (44%) yang mencakup 11 perempuan (41% dari total perempuan) dan 3 pria (60% dari total pria). Sementara itu, 8 mahasiswa (25%) berada dalam kategori “kurang”, 7 perempuan (26%) dan 1 laki-laki (20%). Terendah, “tidak sama sekali”, muncul pada 2 murid perempuan (7% perempuan; 6% dari keseluruhan populasi) dan nol pada laki-laki. Jika garis besar ditarik, lebih dari dua pertiga responden (69%) masih dalam kisaran pemahaman “cukup” hingga “kurang”, yang menunjukkan perlunya memperkuat literasi kebijakan.

Dari perspektif gender, perbedaan proporsi antara jawaban relatif kecil, sehingga tidak menunjukkan kesenjangan ekstrem, tetapi detailnya mengisyaratkan nuansa penting: pria cenderung terkonsentrasi pada tingkat “memadai” (60%) dan sama sekali tidak dalam kategori terendah, sementara perempuan tersebar lebih luas, mulai dari “baik” hingga “tidak sama sekali”. Distribusi ini konsisten dengan temuan bahwa hambatan struktural (misalnya akses ke informasi dan beban ganda) lebih memengaruhi perempuan, menciptakan kelompok yang sangat terinformasi serta kelompok dengan sedikit pemahaman. Artinya, intervensi untuk meningkatkan pemahaman perlu dua arah: memperluas sosialisasi berkelanjutan untuk mengangkat kelompok bawah, dan sekaligus memfasilitasi ruang diskusi lebih lanjut sehingga kelompok yang sudah “baik” dapat bertindak sebagai agen transmisi pengetahuan, terutama di kalangan mahasiswi yang dominan jumlahnya. Sosialisasi yang efektif mencakup elemen formal dan informal, seperti pendampingan dan pendidikan sebaya, yang membantu menyelaraskan kebutuhan pribadi dengan prioritas organisasi dan gaya kepemimpinan. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, proses adaptasi individu dalam lingkungan organisasi menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan (Tull, 2023; Tull dkk., 2023b, 2023a).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa gender memengaruhi cara guru mendekati pengajaran. Guru perempuan, misalnya, sering kali menghadapi tantangan terkait stereotip gender yang menganggap mereka kurang kompeten dalam bidang tertentu, seperti sains, yang dapat memengaruhi pendekatan pedagogik mereka (Mapulanga & Bwalya, 2025). Selain itu, perempuan menghadapi hambatan yang terlihat nyata dalam mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) karena faktor teknis, sosial, dan budaya. Hambatan ini termasuk lokasi, infrastruktur, konektivitas, waktu, uang, kurangnya konten yang relevan, pendidikan dan literasi yang rendah, dan norma sosial (Fatima et al., 2025; Moletsane, 2025). Hambatan ini mencegah perempuan mendapatkan manfaat penuh dari TIK, yang sangat penting untuk memahami tujuan kebijakan pemerintah.

Di lingkungan sekolah, hal ini berdampak pada kesenjangan pemahaman guru perempuan dalam menerapkan kebijakan sastra masuk kurikulum. Jika ditarik demi administrasi negara, maka kesenjangan tersebut akan mengakibatkan rendahnya partisipasi politik perempuan di kancah demokrasi. Karena temuan yang disajikan oleh itu, kesenjangan pengetahuan politik

gender tetap ada, dengan perempuan menunjukkan pengetahuan politik yang lebih rendah daripada laki-laki, yang memengaruhi partisipasi mereka dalam demokrasi deliberatif (Jennings dkk., 2022)

Informasi dan Pelatihan Terkait Kebijakan

Informasi terkait PPG dan pelatihan tentang kebijakan “Sastra Masuk Kurikulum” tidak merata. Perlu dijelaskan bahwa pelatihan yang dimaksud dalam kuesioner ini mencakup segala bentuk pembekalan, baik yang merupakan bagian dari kurikulum PPG secara formal maupun kegiatan tambahan di luar jadwal reguler (seperti seminar, workshop, atau sosialisasi oleh dinas pendidikan). Ketidakjelasan batas antara keduanya dalam instrumen penelitian ini merupakan keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan temuan. Hampir setengah dari murid (13 dari 27) dan tiga dari lima murid mengatakan “tidak” untuk menerima pelatihan, sementara 14 murid dan dua murid menjawab “ya”. Pola ini menegaskan dua hal: pertama, ketersediaan pelatihan terbatas; Kedua, perempuan sedikit lebih beruntung dalam mengaksesnya, tetapi perbedaan absolutnya sangat kecil sehingga tidak dapat menutup kesenjangan akses secara keseluruhan. Jika dibiarkan, inkonsistensi pengalaman pelatihan akan menular pada proses implementasi di kelas setelah mereka menjadi guru. Ketersediaan pelatihan secara keseluruhan terbatas, sebagaimana dibuktikan dengan fakta bahwa hampir setengah murid (13 dari 27) dan tiga dari lima murid menolak pelatihan, sementara hanya 14 murid dan dua murid yang menerimanya. Hal ini menandakan keterbatasan peluang atau akses program pelatihan yang terlihat nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemberian pelatihan belum mampu menjangkau atau menarik semua target dengan maksimal, secara kuantitas maupun kualitas pelaksanaan (Dagnev Gebrehiwot & Elantheraiyan, 2023).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi atau pelatihan yang memadai mengenai kebijakan “Sastra Masuk Kurikulum” dalam program PPG mereka. Temuan mengonfirmasi pendapat (Suhandi & Robi’ah, 2022) yang menyatakan bahwa kurangnya pelatihan khusus kebijakan baru dalam program pelatihan guru dapat berdampak pada kesiapan implementasi di lapangan. Kurangnya akses ke informasi dan pelatihan yang relevan dapat menghambat calon guru dalam memahami sepenuhnya konsep dan tujuan kebijakan ini.

Kesiapan Mahasiswa Menerapkan Kebijakan

Gambaran kesiapan pribadi untuk menerapkan kebijakan mencerminkan efek langsung dari akses ke pelatihan. Kelompok “siap” didominasi oleh mahasiswi (12 orang) dan diikuti oleh dua mahasiswa; Kelompok “cukup siap” terdiri dari delapan murid perempuan dan satu murid perempuan; sisanya merasa “kurang” atau “tidak siap”. Ini berarti bahwa meskipun ketidaksiapan yang terlihat nyata (29% dari populasi), mayoritas responden (44%) setidaknya berada pada tingkat “cukup siap”. Perempuan kembali tersebar di semua kategori, dari yang sangat siap hingga tidak siap sama sekali, menunjukkan heterogenitas pengalaman belajar selama PPG. Untuk pria, polanya lebih terkonsentrasi (hanya satu yang “cukup siap”, dua “kurang siap”, tidak ada yang “tidak siap”), sehingga variasi internal mereka lebih sempit.

Berdasarkan survei tersebut, beberapa mahasiswa menyatakan sudah siap atau cukup siap, namun yang lain merasa tidak siap atau sama sekali tidak siap untuk menerapkan kebijakan “Sastra masuk kurikulum” setelah lulus. Fakta ini menunjukkan bahwa kesiapan implementasi kebijakan sastra masuk kurikulum di kalangan mahasiswa PPG masih perlu lebih mendapat perhatian dari penyelenggara pendidikan. Kesenjangan kesiapan antar-gender terhadap penerapan program sastra masuk kurikulum berpotensi menghambat implementasi program di lapangan.

Kesiapan Kurikulum dan Kebutuhan Sumber Daya

Terakhir, persepsi kesiapan kurikulum PPG sendiri secara umum positif: 22 responden (19 murid, 3 murid) menilai kurikulum sebagai “siap”, sedangkan 10 (8 murid, 2 murid) merasa “tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa PPG dinilai memberikan seperangkat konsep dan materi yang memadai, meskipun implementasi di lapangan masih perlu penguatan, terutama bagi mereka yang belum pernah mengikuti pelatihan tambahan. Secara keseluruhan, ketiga temuan tersebut saling terkait: akses ke pelatihan memengaruhi kesiapan individu, dan persepsi positif terhadap kurikulum tidak secara otomatis menjamin kesiapan lapangan.

Rekomendasinya, penyelenggara PPG perlu memastikan bahwa pelatihan kebijakan sastra wajib dan merata lintas gender, serta menyiapkan mekanisme pendampingan praktis sehingga murid, terutama mereka yang merasa kurang siap, dapat menjembatani teori kurikulum dengan praktik pengajaran sastra di kelas. Kurikulum PPG, menurut mahasiswa, belum sepenuhnya siap mendukung kebijakan “Sastra masuk kurikulum”. Hampir semua murid menyatakan kebutuhan akan buku, modul, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pembelajaran sastra.

Batasan yang Diprediksi dan Dukungan yang Diharapkan

Dari sisi kendala implementasi, mahasiswa memprediksi berbagai kendala, mulai dari kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan, hingga rendahnya minat mahasiswa. Mahasiswa mengharapkan dukungan pelatihan intensif dari perguruan tinggi dan kementerian sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, mayoritas mahasiswa memberikan saran untuk menambahkan materi sastra masuk kurikulum dalam PPG, karena mereka merasa materi sastra yang disajikan dalam PPG tidak memadai.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh gender terhadap kesiapan mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia Universitas Islam Malang angkatan 2024 dalam mengimplementasikan kebijakan Sastra Masuk Kurikulum. Merujuk pada tiga pertanyaan penelitian yang diajukan, simpulan berikut dapat ditarik. Pertama, terdapat perbedaan pengetahuan kebijakan berdasarkan gender: seluruh mahasiswa laki-laki (100%) menyatakan mengetahui kebijakan, sementara hanya 67% mahasiswa perempuan yang mengetahuinya. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan ekologi akses informasi, bukan perbedaan kapasitas intelektual yang melekat. Kedua, pola sumber informasi yang digunakan berbeda: mahasiswa laki-laki cenderung memanfaatkan sumber yang lebih konsisten dan beragam, sedangkan mahasiswa perempuan memperlihatkan variasi internal yang lebih lebar dalam jenis sumber yang diakses. Ketiga, tingkat kesiapan implementasi menunjukkan pola yang relatif serupa antara kedua kelompok, dengan mayoritas menyatakan siap atau cukup siap, namun mahasiswa laki-laki menunjukkan proporsi kesiapan penuh yang sedikit lebih tinggi (40% siap) dibandingkan mahasiswa perempuan (44% siap, namun dengan variasi yang lebih besar).

Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa gender berpengaruh pada dimensi pengetahuan dan akses informasi kebijakan, tetapi pengaruhnya lebih terbatas pada dimensi kesiapan implementasi yang bersifat praktis. Hal ini menegaskan pentingnya program PPG yang lebih inklusif-gender dalam menyediakan akses pelatihan, materi sastra, dan penguatan pedagogis yang merata. Implikasi terpenting dari kajian ini adalah rekomendasi bagi pengelola PPG dan Kementerian Pendidikan untuk merancang strategi sosialisasi kebijakan dan pelatihan yang mempertimbangkan perbedaan ekologi informasi berbasis gender, sehingga seluruh calon guru baik perempuan maupun laki-laki, dapat mencapai kesiapan implementasi yang optimal.

Untuk penelitian lanjutan, direkomendasikan agar studi berikutnya memperluas sampel lintas institusi PPG dan menggunakan desain campuran (survei diikuti wawancara mendalam) untuk menangkap mekanisme “mengapa” di balik pola optimisme, keraguan, dan kebutuhan dukungan yang muncul pada calon guru. Selain itu, penelitian eksperimental yang menguji efektivitas pelatihan literasi kebijakan yang responsif-gender dapat menjadi agenda riset prioritas untuk mempersempit kesenjangan kesiapan yang ditemukan dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnahdi, G. H., & Schwab, S. (2023). The impact of gender differences in teachers' teaching practices and attitudes on students' math and science achievement in Saudi Arabia: Evidence from TIMSS 2019 data. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1066843>
- Ambarwati, A., Siswiyanti, F., & Muttaqin, K. (2025). Mythical guardians to modern advocates: Rewriting Mbok Delima, a guardian of food sovereignty in ASEAN context. *BAHA STRA*, 45(1), 241–250. <https://doi.org/10.26555/bahastra.v45i2.1585>
- Ambarwati, A., & Siswiyanti, F. (2022). Model Infografik Gastronomi Sastra Indonesia Untuk Mengembangkan Kemahiran Membaca Sastra Siswa Sma. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Kebinekaan dalam Perspektif Bahasa Dan Sastra*. <https://doi.org/10.55981/brin.305.c423>
- Berhanu, K. Z., Ayele, W. G., & Naidoo, P. (2026). The role of teachers' language usage in the relationship between their awareness toward the concept of gender equality and gender pedagogy practice in upper primary schools. *BMC Psychology*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03827-1>
- Černoša, A. (2025). Ethics, Empathy And Interpretation: The Educational Potential Of Literature In Book Clubs. *Sodobna Pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies*, 76(4). <https://doi.org/10.63384/spB54z860s>
- Dagnew Gebrehiwot, G., & Elantheraiyan, P. (2023). A study on the effect of training on employee performance in the case of Mekelle City, Tigray, Ethiopia. *Social Sciences and Humanities Open*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100567>
- Dishari, S., & Alafnan, M. A. (2023). Gender Differences in Teaching Literature Through an Emotional Intelligence Model. *Educational Administration: Theory and Practice*, 29(3). <https://doi.org/10.52152/kuey.v29i3.709>
- Dwityas, N. A., Wahyuni, H. I., & Andarwati, S. (2025). Leveraging social media for women's economic empowerment: strategies and dimensions in the Indonesian context. *Gender Technology and Development*, 29(2), 326–343. <https://doi.org/10.1080/09718524.2025.2506957>
- Fatima, U., Ahmad, N., Menegaki, A. N., & Wang, H. (2025). How do information and communication technologies (ICTs) empower women? *Women S Studies International Forum*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103057>
- Gandana, I., Nafisah, N., & Imperiani, E. (2021). Critical thinking, literature and teachers' instructional activities: An Indonesian case of community service program for English teachers. *English Language Teaching Educational Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.12928/eltej.v4i2.4279>
- Halimah, Sumiyadi, Mulyati, Y., & Damaianti, V. S. (2020). Critical Literacy Approach in the teaching of literary appreciation using Indonesian short stories. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 10(1). <https://doi.org/10.17509/IJAL.V10I1.24992>
- Imron, A. M., & Nugrahani, F. (2019). Strengthening pluralism in literature learning for character education of school students. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(3), 207–213. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7332>
- Isnaini, D. S. M., Fadlilah, S., & Ikhrom, I. (2022). Exploring Female Pre-Service EFL Teacher's Experiences with Content-Based Instruction: A Narrative Inquiry. *At-Taqqaddum*, 14(2). <https://doi.org/10.21580/at.v14i2.14048>
- Jennings, F. J., Wexler, K., Willingham, G., & Kenski, K. (2022). Fostering learning among women: the democratic outcomes of elaborative primes. *Communication Quarterly*, 70(5). <https://doi.org/10.1080/01463373.2022.2095216>

- Kapadia, R., Vajpayee, A., Varma, A., Bokey, E., Ramachandran, K. K., & Mishra, K. (2026). Reconstructing Identity Through Narrative Voice Language, Memory, and Structures of Power in Contemporary English Literature. *International Journal of Drug Delivery Technology*, 16(8), 287–295. <https://doi.org/10.25258/ijddt.16.8s.40>
- Kier-Byfield, S. (2024). Close reading: Critical feminist method and pedagogical process. In *Intersectional Feminist Research Methodologies Applications in the Social Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.4324/9781003399575-12>
- Laksana, D. N. L., Qondias, D., Veliz, L., Chiu, C., Utami, K. H. D., & Listyana, I. G. A. A. P. (2025). Adapting Mother Tongue-Based Instructional Models to Address Gender Disparities in Literacy and Numeracy Skills. *International Journal of Language Education*, 9(2). <https://doi.org/10.26858/ijole.v1i2.75115>
- Lammert, C., & C. Godfrey, V. (2023). Teachers' Self-Censorship of Children's Literature in Texas—What's Legislation Got to Do With It? *AERA Open*, 9. <https://doi.org/10.1177/23328584231201814>
- Lewis, J. D., Fane, K. E., Ingraham, A. M., Khan, A., Mills, A. M., Pitt, S. C., Ramo, D., Wu, R. I., & Pollart, S. M. (2018). Expanding opportunities for professional development: Utilization of twitter by early career women in academic medicine and science. *Jmir Medical Education*, 20(7). <https://doi.org/10.2196/11140>
- Malin, J. R., & Lubienski, C. (2022). Information Pollution in an Age of Populist Politics. *Education Policy Analysis Archives*, 30. <https://doi.org/10.14507/EPAA.30.6144>
- Mapulanga, T., & Bwalya, A. (2025). Gender Differences in Secondary School Students' Perceptions of Teaching Practices Used in Biology Classrooms. *African Journal of Research in Mathematics Science and Technology Education*, 29(1), 42–53. <https://doi.org/10.1080/18117295.2024.2444793>
- Moletsane, R. (2025). The Impact of Digital Divide on Women: A Rural Community Case. *Procedia Computer Science*, 263, 791–797. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.07.095>
- Mukagiahana, J., Sibomana, A., & Ndiritu, J. (2024). Teachers' understanding of gender responsive pedagogy and its application in teaching process: Case after teacher training program interventions in Rwanda. *Journal of Pedagogical Research*, 8(1). <https://doi.org/10.33902/JPR.202423067>
- Muttaqin, K., & Murniatie, I. U. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Lectora dalam Menelaah Struktur dan Kebahasaan Puisi Rakyat. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP)*, 3(2). <https://doi.org/10.31539/kibasp.v3i2.1222>
- Navarro, J. N., & Antunes, M. J. L. (2023). Building Welcoming Spaces on Social Media: Motherhood in Academia During a Pandemic and Beyond. In *Academic Mothers Building Online Communities It Takes A Village*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26665-2_15
- Neuman, L. (2016). The right of access to information: Exploring gender inequities. *IDS Bulletin*, 47(1). <https://doi.org/10.19088/1968-2016.108>
- Rahmah, L., Purwanta, E., Wijayanti, W., & Suhardiman, S. (2024). Navigating the Curriculum Landscape: The Impact of Curriculum 2013 and Merdeka Curriculum on Teachers' and Students' Learning Outcomes in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 917–930. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.4061>
- Rogošić, S., & Baranović, B. (2024). Gender Sensitivity of Teacher Education Curricula in the Republic of Croatia. *Open Education Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.1515/edu-2022-0225>
- Sadrul Huda, S. S. M., & Shupti, S. P. (2025). Dynamics of Social Media Influencers: Gendered Perspectives. In *Gendered Nature of Social Media Networks*. <https://doi.org/10.1201/9781774919651-1>
- Suhandi, A. M., & Robi'ah, F. (2022). Guru dan Tantangan Kurikulum Baru: Analisis Peran Guru dalam Kebijakan Kurikulum Baru. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5936–5945. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3172>
- Tull, A. (2023). Supervision And Mentorship In The Socialization Process. In *Becoming Socialized in Student Affairs Administration A Guide for New Professionals and their Supervisors*. <https://doi.org/10.4324/9781003443193-10>
- Tull, A., Hirt, J. B., & Saunders, S. A. (2023a). Becoming Socialized In Student Affairs Administration: A Guide for New Professionals and Their Supervisors. In *Becoming Socialized in Student Affairs*

- Administration A Guide for New Professionals and their Supervisors*.
<https://doi.org/10.4324/9781003443193>
- Tull, A., Hirt, J. B., & Saunders, S. A. (2023b). Conclusions And Recommendations. In *Becoming Socialized in Student Affairs Administration A Guide for New Professionals and their Supervisors*.
<https://doi.org/10.4324/9781003443193-15>
- Van Leent, L., & Spina, N. (2023). Teachers' representations of genders and sexualities in primary school: the power of curriculum and an institutional ideological code. *Australian Educational Researcher*, 50(3). <https://doi.org/10.1007/s13384-022-00515-6>
- Vu, M. T., & Pham, T. T. T. (2025). Gender, critical pedagogy, and textbooks: Understanding teachers' (lack of) mediation of the hidden curriculum in the EFL classroom. *Language Teaching Research*, 29(7), 3143–3169. <https://doi.org/10.1177/13621688221136937>
- Wahyuni, S., Ambarwati, A., Ghony, J., & Osman, Z. (2022). *Authentic Assessment Model In Literature Learning Integrated Multicultural Character*. 5(2), 134–150.
<https://doi.org/10.26499/jentera.v11i1.4668>
- Wang, J., & Zhang, X. (2026). Cultural Narratives and Communicative Functions in Academic Discourse: Qualitative Content Analysis of Scholarly Articles of Cultural Identity in Modern Chinese Literature Research. *Studies in Media and Communication*, 14(2), 236–247.
<https://doi.org/10.11114/smc.v14i2.8194>
- Yeasmin, Dr. M. (2023). Pre-Service Teachers' Perceptions about Gender Equality. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(4).
<https://doi.org/10.54660/ijmrge.2023.4.4.427-431>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang telah mendanai penelitian ini melalui Hibah PPG Universitas Islam Malang 2024/2025.